

876
450
0
e1

GENDER DAN PENDIDIKAN

I. Pendahuluan

Salah satu cara untuk mengukur kemajuan bangsa adalah dengan melihat kedudukan dan tingkat perkembangan perempuannya dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai indikator dari kedudukan perempuan ditentukan antara lain oleh kedudukan hukum, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, ketenagakerjaan dan peranannya dalam politik dan pemerintahan.

Setiap produk pendidikan merupakan investasi untuk hari depan seseorang. Tetapi bila pendidikan dilihat dari sudut gender maka data statistik tentang pendidikan formal menggambarkan masih menggejala ketimpangan gender dan semakin mencolok pada strata yang semakin tinggi.

Pendidikan formal nampaknya terbuka bagi setiap anak. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan Wajib Belajar 9 tahun. Namun hingga kini kesempatan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa sebab diantaranya adalah : masih adanya mitos : perempuan tidak secerdas laki-laki dan stereotipi bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama sementara perempuan adalah pengatur rumah tangga yang semua hal tersebut menyebabkan belum seluruh orang tua Indonesia yang menganggap pendidikan formal bagi anak perempuan dan anak laki-laki sama pentingnya.

Persamaan hak dan kewajiban antara pria dan perempuan telah dijamin oleh UUD 1945 pasal 27 (1) yang dikuatkan lagi oleh GBHN. Demikian juga secara khusus pasal 31 UUD 1945 dan dimantapkan lagi melalui Sistem Pendidikan

Nasional 1989 membuka kesempatan yang sama bagi pria dan perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Dalam pembangunan nasional, pendidikan merupakan bagian dari pembangunan Sumberdaya Manusia yang menempati posisi strategis dan modal dasar dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri. Paradigma baru dari pembangunan yang menitikberatkan pada upaya memampukan manusia dan masyarakat seluruhnya untuk sejahtera dengan kekuatan sendiri " *A People Centered Development* ".

II. Kondisi Pendidikan Dewasa Ini

Meskipun berbagai kemajuan-kemajuan dalam rangka menuju kesetaraan pria dan perempuan telah dapat kita rasakan bersama, namun ternyata kalau ditilik secara seksama dari data-data statistik yang ada khususnya dari bidang pendidikan yang dicermati dari kaca mata gender jelas sekali menggambarkan bahwa perempuan masih tertinggal jauh di belakang pria. Padahal hasil studi meta-analisis (*Maccoby & Jacklin, 1974*) tentang kemampuan anak-anak di berbagai lingkungan budaya menghasilkan temuan bahwa tidak ada perbedaan gender pada kemampuan intelegentifnya.

Di Tingkat Jawa Tengah

Data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Jawa Tengah memiliki kecenderungan yang hampir sama dengan tingkat nasional, dimana tingkat pendidikan pria lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Jumlah buta huruf perempuan 3.192.009 orang sedangkan pria 2.261.638 orang.

Jenjang Pendidikan	Perempuan	Laki-laki
SD	959.725	1.065.694
SLTP	805.721	798.425
SLTA	474.660	500.870
PT/ Diploma	114.847	140.924

Sumber Data : Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2000

Profil Kabupaten Jepara

Sebaran tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas yang masih sekolah menurut jenis kelamin tertera pada tabel di bawah ini, menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang masih sekolah di tingkat SD 42,42 % lebih rendah dibandingkan pria yang masih sekolah di tingkat SD (57,57%). Untuk tingkat SMTP, SMTA dan Diploma/Universitas ternyata perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Tabel . 1.

Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang masih sekolah di Kab Jepara

Jenjang Pendidikan	Perempuan	Laki-laki
SD	23.773 (42,42 %)	32.263 (57,57 %)
SMTP	24.880 (51,43 %)	23.501 (48,57 %)
SMTA	14.546 (52,97 %)	12.912 (47,03 %)
Diploma / Universitas	1.313 (57%)	990 (43 %)
Tidak mampu membaca	86.583 (42,67 %)	64.463 (57,33 %)

Sumber Data : Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2000

Sedangkan jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas dan jenjang pendidikan yang sudah ditamatkan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel . 2

Jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas dan jenjang pendidikan yang sudah ditamatkan di Kabupaten Jepara

Jenjang Pendidikan	Perempuan	Laki-laki
Tidak / Belum pernah sekolah	57.381 (72,82 %)	21.408 (27,18 %)
Tidak / Belum tamat SD/MI	91.478 (51,21 %)	88.126 (48,79 %)
SD/MI	150.625 (48,43 %)	160.341 (51,57 %)
SLTP	56.877 (45,86 %)	67.139 (54,14 %)
SMU	21.692 (34,06 %)	41.989 (65,94 %)
SMK	6.952 (43,64 %)	8.976 (56,36 %)
Diploma I / II	667 (100 %)	0
Sarmud / Diploma III	1.313 (43,89 %)	1.678 (56,11 %)
S1, S2 / Diploma IV	1.334 (21,30 %)	4.928 (78,70 %)
Jumlah	388.319	394.585

Sumber Data : Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2000

Dari 2 tabel tersebut di atas, pada tabel 1 di atas ternyata perempuan yang masih sekolah mempunyai tingkat prosentase lebih tinggi dari kaum laki-laki, tetapi dari tabel kelulusan perempuan justru lebih rendah dari laki-laki, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Kemungkinan tersebut antara lain, putus di tengah jalan karena tidak mampu secara ekonomis atau tidak mampu untuk berpikir atau tidak lulus atau kemungkinan yang lain keluar karena berumah tangga.

iii. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender dalam pendidikan

Beberapa faktor dapat disimak sebagai hal-hal yang dapat menentukan terjadinya ketimpangan gender, sebagai berikut :

1. Faktor Nilai Budaya

Faktor ini merupakan kendala terbesar bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan pria dalam pendidikan. Hal ini tercermin dari sistem nilai dalam masyarakat yang memberi nilai lebih tinggi kepada anak laki-laki dari anak perempuan karena masih kentalnya stereotipi/mitos/anggapan yang 'mengkotak' perempuan dengan peran domestik (reproduksi) dan pria dengan peran publik (produktif).

Pandangan stereotipi terhadap perempuan tersebut secara psikologis juga mempengaruhi harga diri dan kemampuan perempuan untuk bicara di depan umum, menyatakan diri, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan serta peluang pelatihan penjejangan yang tersedia dan jabatan-jabatan.

Sistem nilai yang menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap perempuan lebih dibakukan lagi dengan adanya buku-buku pelajaran di sekolah dan sikap tingkah laku guru-guru yang masih bias gender.

2. Faktor Ekonomi

Sering terjadi lemahnya ekonomi keluarga memperkuat alasan untuk mendahulukan anak laki-laki daripada anak perempuan untuk memperoleh pendidikan, walaupun kemungkinan anak perempuan kecerdasannya lebih menjanjikan harapan yang lebih baik daripada anak laki-laki.

Anak perempuan terutama di pedesaan umumnya lebih diarahkan untuk membantu ibunya mencari nafkah atau menjaga adik-adiknya dan pekerjaan rumah tangga lainnya karena orang tua yang kurang mampu apalagi kalau keuangan keluarga dipegang oleh suami selaku kepala keluarga.

3. Faktor Geografis

Sekolah yang letaknya jauh dari rumah penduduk terutama letak SMP yang jauh dari desa (di kecamatan), menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak perempuan. Apalagi kalau ditempati sekolah belum ada sarana tempat tinggal ASRAMA khusus bagi perempuan.

Mahalnya transportasi fasilitas angkutan di daerah akan menambah kemungkinan lagi anak perempuan untuk tinggal di rumah.

4. Faktor Kelembagaan

Faktor lain yang menyebabkan kurang gencarnya upaya meningkatkan derajat pendidikan perempuan adalah karena kendala struktural dan mekanisme administrasi birokrasi yang belum dilengkapi dengan data gender yang akurat dan kemampuan untuk merumuskan dan merencanakan program pembangunan pendidikan dengan perspektif gender.

Seringkali terjadi tanpa sadar para pengambil keputusan menganggap data gender ini tidak diperlukan karena menurut pendapat mereka tidak ada lagi peraturan yang melarang anak perempuan masuk sekolah dan disekolahkan. Sekolah pun tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan.

Tetapi justru karena tidak lengkapnya data pendidikan yang dibedakan menurut jenis kelamin per daerah, maka informasi yang menunjukkan ketimpangan gender tidak 'muncul' tindakan perbaikan dan program-program yang peka terhadap kebutuhan pendidikan anak perempuan pun tidak kunjung tiba.

Ditambah lagi keterlibatan perempuan sebagai pelaku dan pengambil keputusan dalam bidang pendidikan masih tergolong rendah, walau pegawai perempuan dalam lingkungan Depdikbud tergolong tinggi.

IV. Implikasi Pendidikan Perempuan Terhadap Mutu Ketahanan Keluarga

Perempuan bersama-sama pria merupakan aset dan sumber daya dalam proses Pembangunan Bangsa yang berwawasan Kemitrasejajaran, khususnya dalam membangun dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

1. Status Kesehatan Keluarga

Penelitian membuktikan makin tinggi pendidikan perempuan makin tinggi dampaknya terhadap derajat kesehatan keluarga. Survei kesehatan dan demografi 1994 menunjukkan korelasi tingkat pendidikan perempuan dengan kemampuan mengambil keputusan tentang umur kawin pertama, KB, pemeriksaan kehamilan, pertolongan pada waktu melahirkan, ASI, GIZI, imunisasi bayi, perawatan dan kebersihan pribadi serta kesehatan lingkungan. Lebih lanjut, sesuai dengan peran gender dalam keluarga kenyataannya perempuan/ibu merupakan penentu kesehatan keluarga, angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

2. Pembangunan Ekonomi Keluarga

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perempuan nampaknya akan lebih menjamin untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih produktif serta upah kerja yang lebih tinggi.

V. Upaya Peningkatan Pendidikan Perempuan

- a. Meminimalkan stereotipi peran gender yang menghambat kemajuan perempuan dengan mengintensifkan kegiatan melalui KIE yaitu melalui media

- massa, radio/TV, seminar/dialog/diskusi, penyuluhan untuk memotivasi orang tua menyekolahkan anak tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.
- b. Menerapkan konsep pendekatan dan analisis gender dalam penentuan kebijakan dan penyusunan program-program pembangunan pendidikan.
 - c. Meningkatkan kesadaran gender diantara para pengambil kebijakan di jajaran Depdikbud, terutama para Guru agar lebih peka gender.
 - d. 'Mendekatkan' jarak sekolah dengan tempat peserta didik.
 - e. Memperbanyak prasarana pendidikan berupa asrama putri dan beasiswa bagi anak perempuan
 - f. Mengkaji materi pendidikan yang masih diskriminatif
 - g. Menambah alokasi anggaran pendidikan sehingga memberi peluang lebih besar bagi anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hawal El saddawi : *Perempuan Dalam Budaya Patriali*, Pustaka Pelajar Yogyakarta ; 2001.
2. Kamla Ubhasri : *Memahului Gender*, Teplok Press, Yogyakarta ; 2000.
3. Mansour Fakih : *Analisis Gender & Transformasi Sosial* : Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1997.
4. *Jepara Dalam Angka 2000* ; Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara : 2000.

UPT-PUSTAK-UNBIP